

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Reformasi juga memberikan hikmah yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah. Dengan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan suatu daerah yang selama ini tersimpan akan dapat terlaksana sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan otonomi daerah diyakini memberikan peluang bagi daerah untuk lebih maju. Namun demikian, oleh sebagian kalangan kebijakan ini dianggap dimulai terlalu cepat. Pelaksanaan desentralisasi dianggap sebagai pendekatan yang mengejutkan karena pendeknya waktu persiapan untuk setiap wilayah yang cukup besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan. Hal ini bisa berarti kebijakan otonomi ini dimulai justru pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaannya kelihatannya sederhana, namun mengandung pengertian yang cukup rumit karena didalamnya juga terkandung pendewasaan politik daerah, pemberdayaan masyarakat dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat. Sebab bagaimanapun juga tuntutan pemerataan, tuntutan keadilan yang sering dilancarkan baik menyangkut ekonomi maupun politik akan menjadi relatif dan dilematis apabila tergantung pada tinjauan perspektif yang berbeda antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah dipandang cukup merata, tetapi perspektif daerah meninjau lain

menganggap bahwa hasil dari sumber-sumber kekayaan daerah ditarik ke pusat jauh tidak seimbang dengan hasil yang diberikan ke daerah.

Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi. Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan.

Dalam pembangunan ekonomi diharapkan adanya dukungan bukan saja dari pertumbuhan kualitas dan kuantitas sumber daya serta kemajuan teknologi tetapi juga oleh struktur sosial dan politik yang stabil sehingga mampu mempercepat jalannya pembangunan ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Namun kenyataannya saat ini lapangan pekerjaan masih merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengingat jumlah penduduk dan angkatan kerja serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah jika tidak didukung oleh kekuatan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar memungkinkan mereka untuk

berharap menerima tanggung jawab yang lebih besar memiliki landasan politik yang lebih kuat dalam mempertahankan hak-hak mereka dalam mengelola pelayanan-pelayanan utama daerah. Di samping itu pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya untuk menggalakkan dan mengadakan investasi rill pada sektor-sektor tertentu. Apabila pendapatan daerah mencukupi, maka pendapatan asli daerah tersebut akan memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang efektif untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

Anggaran belanja operasi untuk kegiatan rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.

Dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengalami perubahan yang sangat berarti seiring dengan diterapkannya otonomi daerah sejak awal tahun 2001. Hal ini ditandai dengan di berlakukannya UU yang menyangkut otonomi daerah yaitu UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (dalam perkembangan kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004).

Implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasional pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati yaitu dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai belanja daerah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrument kebijakan, APBD merupakan indikator penting dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD seharusnya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi referensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggung jawaban sebagai unit pelaksana.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik telah dilakukan sebagaimana yang perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan pada pihak pemerintah agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak dialokasikan pada arah yang salah dan dapat mencapai tujuannya.

Dalam perekonomian daerah, Perkembangan PDRB mengidentifikasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di suatu daerah dalam mendorong peningkatan output daerahnya. Dalam upaya untuk meningkatkan PDRB setiap tahunnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Indikator untuk melihat kondisi pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan menggunakan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode satu tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan perekonomian daerah yang ditunjukkan melalui perkembangan PDRB tiap tahunnya, dimana PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai

tambah yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas ekonomi suatu daerah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Gambaran tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
PDRB di Provinsi Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012
(Miliar Rupiah)

PROVINSI	Tahun		
	2010	2011	2012
Aceh	33,103	34,789	36,600
Sumatera Utara	118,719	126,588	134,464
Sumatera Barat	38,862	41,292	43,912
Riau	97,736	102,666	106,309
Jambi	17,472	18,964	20,374
Sumatera Selatan	63,859	68,008	72,094
Bengkulu	8,340	8,878	9,464
Lampung	38,390	40,859	43,506
Bangka Belitung	10,885	11,588	12,251
Kepulauan Riau	41,076	43,810	47,405
Dki Jakarta	395,622	422,237	449,821
Jawa Barat	322,224	343,111	364,405
Jawa Tengah	186,993	198,270	210,848
Yogyakarta	21,044	22,132	23,309
Jawa Timur	342,281	366,983	393,666
Banten	88,552	94,207	100,000
Bali	28,882	30,758	32,804
Nusa Tenggara Barat	20,073	19,440	19,221
Nusa Tenggara Timur	12,547	13,253	13,972
Kalimantan Barat	30,329	32,138	34,014
Kalimantan Tengah	18,806	20,078	21,420
Kalimantan Selatan	30,675	32,553	34,419
Kalimantan Timur	110,953	115,476	120,067
Sulawesi Utara	18,377	19,735	21,287
Sulawesi Tengah	17,624	19,237	21,019
Sulawesi Selatan	51,200	55,099	59,709
Sulawesi Tenggara	11,654	12,698	14,020
Sulawesi Barat	4,744	5,233	5,704
Gorontalo	2,917	3,141	3,384
Maluku	4,251	4,509	4,861
Utara	3,036	3,230	3,445
Papua Barat	9,361	11,896	13,781
Papua	22,400	21,208	21,436

Sumber Data : PDRB di provinsi-provinsi Indonesia. BPS Surabaya. Tahun 2010-2012

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perbandingan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Indonesia tahun 2010 sampai 2012 menunjukkan hasil yang meningkat. Dari tahun ke tahun jumlah PDRB dari masing-masing Provinsi di Indonesia mengalami kenaikan. Pada Provinsi di Indonesia nilai PDRB tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 395.622 miliar rupiah pada tahun 2010 dan tahun 2012 meningkat sebesar 449.821 miliar rupiah. Sedangkan Provinsi lainnya memiliki jumlah yang kecil walau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yaitu seperti Provinsi Maluku Utara yang memiliki jumlah PDRB sebesar 3.036 miliar rupiah tahun 2010 dan 3.445 miliar rupiah pada tahun 2012.

Untuk terciptanya ekonomi yang berkembang di Provinsi Indonesia maka pembangunan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Indonesia harus mampu memanfaatkan seluruh dana yang ada untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal untuk menggerakkan dan memajukan pemasukan daerah, pemerintah berkewajiban untuk memakai dana sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan semaksimal dan seefisien mungkin. Pembangunan daerah di Provinsi Indonesia diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah ini untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal untuk meningkatkan pendapatan di daerah Provinsi Indonesia dibutuhkan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal untuk membangun daerah ini. Sebagai pedoman perencanaan guna

meningkatkan pembangunan di daerah Provinsi Indonesia, pemerintah harus menggunakan metode pembangunan dari bawah ke atas agar pembangunan ekonomi di daerah ini bisa berkelanjutan dan sesuai dengan harapan kita semua.

Pertumbuhan ekonomi berarti pembangunan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Namun untuk mencapai tingkat perekonomian yang tinggi tidaklah begitu mudah. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan berbagai faktor pendukung seperti sumber daya alam yang tersedia, stabilitas nasional, pengeluaran pemerintah yang tercantum pada APBD dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2012”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengkaji dan meneliti sejauh mana pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka perlu dibuat rumusan masalah agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara terarah. Selain itu, perumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Provinsi Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Provinsi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Provinsi Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Provinsi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah khususnya instansi-instansi terkait..
2. Manfaat teoritis, sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Manfaat ilmiah, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau kerangka pemikiran bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima Bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika Bab tersebut terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan serta Bab V Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 ini menguraikan mengenai landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Landasan teori ini diperoleh dari literatur-literatur yang dapat dijadikan pedoman dasar dalam penelitian dan juga tinjauan kepustakaan terhadap penelitian sebelumnya/terdahulu yang menjelaskan letak perbedaannya. Kemudian bagian akhir adalah hipotesis dan model analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 ini menguraikan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan. Bagian dari metode tersebut yaitu, pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai inti dari penulisan skripsi. Inti dari penulisan didapat dari data yang diperoleh maupun hasil pengolahan data. Bagian dari bab 4 antara lain: gambaran umum obyek, deskripsi objek penelitian, pemilihan model estimasi data panel, hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak bersangkutan.